

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN TEGALREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2023; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	42,000,000.00	42,015,000.00	100.04
BELANJA	12,260,491,229.00	11,791,354,514.00	96.17
Surplus (defisit)	(12,218,491,229.00)	(11,749,339,514.00)	96.17

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023	%
PENDAPATAN	47,530,000.00	42,015,000.00	(11.60)
BELANJA	11,371,888,640.00	11,791,354,514.00	3.69
Surplus (defisit)	(11,324,358,640.00)	(11,749,339,514.00)	3.75

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 42.015.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp 42.000.000,00 turun 11,60 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 47.530.000,-.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.791.354.514,00 atau 37,11% dari target sebesar Rp 12.260.491.229,00 naik 3,69% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 11.371.888.640,00.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0,00%, Retribusi Daerah sebesar 0,00%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,00% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,00%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 42.015.000,00 menurun sebesar 11,60 % dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 47.530.000,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 42,000,000	Rp 42,015,000.00	100.04	0.00
	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 38,000,000.00	Rp 20,740,000.00	0.00	0.00
	Pendapatan Daerah	Rp42,000,000.00	Rp 42,015,000.00	100.04	0.00

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2022	2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 47,530,000.00	Rp 42,015,000.00	0.88
	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00
	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 47,530,000.00	Rp42,015,000.00	0.00
	Pendapatan Daerah	Rp 47,530,000.00	Rp42,015,000.00	0.88

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 81,71%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.909.750.983,00 menurun sebesar 45,82% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 9.005.951.915,00.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 18,29%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 174.052.100,00 atau sebesar 16,83% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 2.119.192.590,00 meningkat sebesar 35,96% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.365.936.725,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	11,368,569,008.00	10,909,750,983.00	95.96	62.54
	Belanja Pegawai	5,868,877,000.00	5,464,113,345.00	93.10	32.29
	Belanja Barang dan Jasa	3,999,811,415.00	3,963,019,178.00	99.08	22.00
	Belanja Hibah	1,499,880,593.00	1,482,618,460.00	98.85	8.25
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	891,922,221.00	881,603,531.00	98.84	4.91

Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	367,869,150.00	360,241,100.00	97.93	2.02
Belanja Gedung dan Bangunan	498,603,071.00	495,962,431.00	99.47	2.74
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25,000,000.00	24,950,000.00	99.80	0.14
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Lainnya	450,000.00	450,000.00	-	-
Jumlah Belanja	12,260,491,229.00	11,791,354,514.00	96.17	67.45

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2022	2023	(%)
1	Belanja Operasi	9,005,951,915.00	10,909,750,983.00	14.39
	Belanja Pegawai	5,627,125,606.00	5,464,113,345.00	-2.90
	Belanja Barang dan Jasa	3,378,826,309.00	3,963,019,178.00	17.29
	Belanja Hibah	-	1,482,618,460.00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	2,365,936,725.00	881,603,531.00	-26.56
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	277,051,800.00	360,241,100.00	30.03
	Belanja Gedung dan Bangunan	1,142,320,582.00	495,962,431.00	-56.58
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	946,264,343.00	24,950,000.00	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	300,000.00	450,000.00	-
	Jumlah Belanja	11,371,888,640.00	11,791,354,514.00	3.69

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan	100,000,000	100,000,000	100	
	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	100	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,576,245,730.00	11,791,354,514.00	155.64	41.64
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	16,847,000.00	16,847,000.00	100.00	0.08
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,846,000.00	1,846,000.00	100.00	0.01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	0.01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550,000.00	550,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,829,000.00	8,829,000.00	100.00	0.05
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,100,000.00	2,100,000.00		
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,876,399,000.00	5,471,635,345.00	93.11	32.30
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,868,877,000.00	5,464,113,345.00	93.10	32.29
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	922,000.00	922,000.00	100.00	0.01
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	0.01
					-
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	176,658,380.00	174,821,000.00	98.96	0.97
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,393,000.00	5,167,000.00	95.81	0.03
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,172,005.00	71,032,275.00	98.42	0.40
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,487,125.00	31,446,975.00	99.87	0.17
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,036,250.00	21,033,750.00	99.99	0.12

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450,000.00	450,000.00	100.00	0.00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46,120,000.00	45,691,000.00	99.07	0.25
					-
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274,369,150.00	267,441,100.00	97.47	1.51
	Pengadaan Mebel	70,600,000.00	69,400,000.00	98.30	0.39
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	203,769,150.00	198,041,100.00	97.19	1.12
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742,412,500.00	739,355,723.00	99.59	4.08
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,180,000.00	3,090,000.00	97.2	0.02
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,938,000.00	96,998,223.00	99.04	0.54
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641,294,500.00	639,267,500.00	99.68	3.53
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489,559,700.00	473,533,082.00	96.73	2.69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107,883,400.00	93,405,200.00	86.58	0.59
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,725,000.00	30,595,000.00	99.58	0.17
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350,951,300.00	349,532,882.00	99.60	1.93
					-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	136,338,950.00	136,207,725.00	99.90	0.75
2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan	25,800,000.00	25,800,000.00	100.00	0.45
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	82,620,000.00	82,620,000.00	100.00	0.45
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	27,918,950.00	27,787,725.00	99.53	0.15
					-
					-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,307,649,449.00	4,271,256,439.00	99.16	23.70
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82,301,200.00	82,249,000.00	99.94	0.45
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di kelurahan	72,077,050.00	72,077,050.00	100.00	0.40
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,254,007,869.00	2,232,403,103.00	99.04	12.40
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,543,369,750.00	1,532,462,250.00	99.29	8.49
	Evaluasi Kelurahan	9,507,120.00	9,147,120.00	96.21	0.05
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	48,385,000.00	47,335,000.00	97.83	0.27
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	192,381,460.00	190,432,916.00	98.99	1.06
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10,320,000.00	10,320,000.00	100.00	0.06
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	36,700,000.00	36,630,000.00	99.81	0.20
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf	40,775,000.00	40,775,000.00	100.00	0.22
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	17,825,000.00	17,425,000.00	97.76	0.10
					-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	140,257,100.00	140,257,100.00	100.00	0.77
4.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang-	60,720,100.00	60,720,100.00	100.00	0.33
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,537,000.00	79,537,000.00	100.00	0.07
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	12,415,000.00	12,415,000.00	100.00	0.07
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67,122,000.00	67,122,000.00		
	Jumlah Belanja	12,260,491,229.00	11,791,354,514.00	96.17	66.86

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2022	(%)	(%)
1		11,791,354,514.00	11,371,888,640.00	0.96	(3.56)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100,000,000.00	175,000,000.00		
	Gelar Budaya Jogja	100,000,000.00	175,000,000.00		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,847,000.00	14,833,000.00	0.88	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,846,000.00	2,221,000.00	1.20	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	1,122,000.00	1,400,000.00	1.25	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550,000.00			

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,600,000.00	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	800,000.00		
	Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	8,829,000.00	9,398,000.00	1.06
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,100,000.00	1,814,000.00	0.86
3	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,471,635,345.00	5,629,325,606.00	1.03
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,464,113,345.00	5,627,125,606.00	1.03
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,000.00	100,000.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	250,000.00	300,000.00	1.20
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	250,000.00	300,000.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000.00	500,000.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	922,000.00	100,000.00	0.11
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	800,000.00	800,000.00	
	Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	100,000.00	100,000.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	600,000.00		-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400,000.00		-
	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD	400,000.00		
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	800,000.00		-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	400,000.00		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	400,000.00		
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,600,000.00		-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	185,807,000.00	148,031,840.00	0.80
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,167,000.00	6,104,800.00	1.18
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,032,275.00	72,815,940.00	1.03
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,446,975.00		-
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,033,750.00	20,071,100.00	0.95
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45,691,000.00	300,000.00	0.01
	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,436,000.00	48,740,000.00	4.26
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267,441,100.00	216,912,800.00	0.81
	Pengadaan Mebel	69,400,000.00		-
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	198,041,100.00	216,912,800.00	1.10
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739,355,723.00	649,472,909.00	0.88
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,090,000.00	7,730,000.00	2.50
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,998,223.00	85,740,104.00	0.88
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	639,267,500.00	556,002,805.00	0.87
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589,344,082.00	345,200,782.00	0.59
	Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	93,405,200.00	76,427,900.00	0.82
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	30,595,000.00	35,826,000.00	1.17
	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115,811,000.00	193,956,743.00	1.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	349,532,882.00	38,990,139.00	-
8	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	136,207,725.00	713,191,606.00	5.24
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		161,979,224.00	-
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana	25,800,000.00	257,619,500.00	9.99
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	82,620,000.00	20,348,750.00	0.25
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	27,787,725.00	48,863,132.00	1.76
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		224,381,000.00	-
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,271,256,439.00	3,336,522,365.00	0.78
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3,336,522,365.00	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82,249,000.00		-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72,077,050.00		-

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,232,403,103.00	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1,532,462,250.00	-	
	Evaluasi Kelurahan	9,147,120.00	-	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	47,335,000.00	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	190,432,916.00	-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10,320,000.00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36,630,000.00	-	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	40,775,000.00	-	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	17,425,000.00	-	
10	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	60,720,100.00	143,397,732.00	2.36
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		11,250,000.00	-
	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-undangan	60,720,100.00	132,147,732.00	2.18
11	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	79,537,000.00		-
	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	12,415,000.00		-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67,122,000.00		-
	Jumlah Belanja	11,791,354,514.00	11,371,888,640.00	0.96 -3.56

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya terdapat hambatan yakni faktor ketersediaan stok barang yang dimiliki oleh penyedia dan anjuran untuk memilih barang yang ber-TKDN dimana tidak setiap penyedia mampu memenuhi syarat tersebut sehingga dalam melakukan proses pemilihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pelaksanaan Pekerjaan fisik harus mempertimbangkan kewenangan kemantren/kelurahan agar tidak berbenturan dengan kewenangan instansi terkait, adanya pekerjaan yang membutuhkan kajian dari instansi terkait, serta terkait kedudukan alas hak (tanah Pemerintah Kota Yogyakarta) merupakan suatu kendala sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi tertunda.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	Pajak Daerah	0	0
	Retribusi Daerah	0	0
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp42,015,000	Rp47,530,000

Penjelasan :

Realisasi pendapatan per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp 42.015.000,00. Pembayaran retribusi berdasarkan kewajiban bayar.

3.2	Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	BELANJA DAERAH	11,791,354,514.00	11,371,888,640.00
	BELANJA OPERASI	10,909,750,983.00	9,005,951,915.00
	Belanja Pegawai	5,464,113,345.00	5,627,125,606.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,603,755,856.00	2,714,203,973.00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,860,357,489.00	2,912,921,633.00
	Belanja Barang dan jasa	3,963,019,178.00	3,378,826,309.00
	Belanja Barang	1,147,845,645.00	1,192,503,307.00
	Belanja Jasa	2,150,104,423.00	1,940,358,002.00
	Belanja Pemeliharaan	564,874,110.00	156,565,000.00
	Belanja Perjalanan Dinas	97,195,000.00	89,400,000.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	3,000,000.00	-
	Belanja Hibah	1,482,618,460.00	
	BELANJA MODAL	881,603,531.00	2,365,936,725.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360,241,100.00	277,051,800.00
	Belanja Modal Alat Besar		8,400,000.00
	Belanja Modal Alat Pertanian		375,000.00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	222,791,100.00	107,438,000.00
	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	4,500,000.00	2,365,400.00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
	Belanja Modal Alat Laboratorium		1,500,000.00
	Belanja Modal Komputer	128,950,000.00	131,523,400.00
	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4,000,000.00	
	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	15,450,000.00
	Belanja Modal Peralatan olah raga		10,000,000.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	495,962,431.00	1,142,320,582.00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	495,962,431.00	1,142,320,582.00
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	24,950,000.00	946,264,343.00
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	24,950,000.00	946,264,343.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	450,000.00	300,000.00

Penjelasan :

3.3	Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Beban Pajak Daerah	0	0
	Beban Retribusi Daerah	0	0
	Beban Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
	Beban Lain-lain PAD yang Sah	Rp 45,010,416.67	Rp 44,356,250.00

Penjelasan :

Pendapatan-LO per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp 45.010.416,67,00. Pendapatan ini berasal dari retribusi pemakaman.

3.4	Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Beban- LO Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Pendapatan Daerah		
	Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat	45,010,416.67	44,356,250
	BEBAN DAERAH		
	BEBAN OPERASI	9,446,298,454.00	9,013,229,633.00
	Beban Pegawai	5,464,113,345.00	5,627,125,606.00
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2,603,755,856.00	2,714,203,973.00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2,860,357,489.00	2,912,921,633.00
	Beban Barang dan jasa	3,962,385,109.00	3,386,104,027.00
	Beban Barang	1,145,477,350.00	1,193,028,972.00
	Beban Jasa	2,151,838,649.00	1,947,110,055.00
	Beban Pemeliharaan	564,874,110.00	156,565,000.00
	Beban Perjalanan Dinas	97,195,000.00	89,400,000.00
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	3,000,000.00	-
	Beban Hibah	19,800,000.00	
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	832,603,501.50	780,098,040.14
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	285,699,532.35	306,722,356.07
	Beban Penyusutan alat Besar	22,859,964.29	44,971,234.00
	Beban Penyusutan alat angkutan	54,344,024.98	56,787,676.19
	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan alat ukur	1,008,000.00	1,908,000.00
	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1,750,000.00	1,750,000.00
	Beban Penyusutan Alat Kantor dan rumah tangga	131,523,043.48	120,933,467.42
	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2,027,680.00	3,311,140.00
	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	3,969,030.00	3,969,030.00
	Beban Penyusutan alat Laboratorium	2,615,100.00	3,517,744.00
	Beban Penyusutan Komputer	54,075,975.00	58,287,350.00
	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	750,000.00	375,000.00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	10,776,714.60	10,911,714.46
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271,010,018.17	249,620,949.26
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	257,498,756.43	246,379,089.16
	Beban Penyusutan Monumen	9,341,921.64	1,491,000.00
	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	4,169,340.10	1,750,860.10
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	219,954,100.98	180,802,809.81
	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	184,810,657.81	147,968,774.48
	Beban Penyusutan Bangunan Air	29,965,133.48	26,422,282.65
	Beban Penyusutan Instalasi	5,178,309.69	5,589,543.44
	Beban Penyusutan Jaringan		822,209.24
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55,939,850.00	42,951,925.00
	JUMLAH BEBAN	10,278,901,955.50	9,793,327,673.14
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(10,233,891,538.83)	(9,748,971,423.14)

Penjelasan realisasi :

3.5	Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Aset Tetap	20,465,871,641.32	19,378,379,020.98
	Tanah	98,787,000.00	98,787,000.00
	Tanah	98,787,000.00	98,787,000.00
	Peralatan Dan Mesin	3,483,598,546.85	3,187,811,825.28
	Alat Besar	459,741,895.46	454,794,143.46
	Alat Angkutan	625,275,227.82	603,574,535.37
	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5,040,000.00	7,440,000.00
	Alat Pertanian	7,000,000.00	7,000,000.00
	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1,397,774,816.08	1,252,177,229.18
	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	41,325,477.06	61,914,878.12
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	19,845,150.00	19,845,150.00
	Alat Laboratorium	26,151,000.00	35,177,439.98
	Komputer	784,115,930.13	595,616,006.57
	Alat Keselamatan Kerja	1,500,000.00	17,350,000.00
	Rambu - Rambu	90,345,050.30	107,438,442.60
	Peralatan Olah Raga	25,484,000.00	25,484,000.00
	Gedung Dan Bangunan	13,400,756,348.57	12,705,958,917.57
	Bangunan Gedung	13,140,918,843.57	12,446,121,412.57
	Monumen	149,100,000.00	149,100,000.00
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	110,737,505.00	110,737,505.00

Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3,105,499,210.58	3,008,490,742.81
Jalan Dan Jembatan	1,843,994,245.20	1,843,994,245.20
Bangunan Air	1,164,496,497.61	1,164,496,497.61
Instalasi	64,120,098.50	64,120,098.50
Jaringan	32,888,369.27	32,888,369.27
Aset Tetap Lainnya	366,404,535.32	366,504,535.32
Bahan Perpustakaan	18,728,535.32	18,553,535.32
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	347,676,000.00	347,951,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,826,000.00	10,826,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,826,000.00	10,826,000.00
Jumlah Aset Tetap	20,465,871,641.32	19,378,379,020.98

Penjelasan :

Penambahan Aset dari kelompok Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp. atau sebesar 22,84% dari tahun 2022, terdiri dari: Alat Besar naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 28,23% dari tahun 2022; Alat Angkutan naik sebesar Rp. atau sebesar 19,11% dari tahun 2022; Alat Bengkel dan alat ukur naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 37,45% dari tahun 2022; Alat pertanian naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 100% dari tahun 2022; Alat Kantor dan Rumah Tangga naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 26,38% dari tahun 2021; Alat studio, Komunikasi dan Pemancar naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 2,53%; Alat Kedokteran dan Kesehatan naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 24,95% dari tahun 2021; dan Komputer naik sebesar Rp. ,00 atau sebesar 25,52%.

Penambahan Aset dari Kelompok Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp. 1.125.953.716,49 atau sebesar 5,38% dari tahun 2022, terdiri dari Bangunan Gedung naik sebesar Rp. 567.983.263,12 atau sebesar 2,82%; Monumen naik sebesar Rp. 135.780.000,00 atau sebesar 379,02% dari tahun 2022; dan Tugu Titik Kontrol/Pasti naik sebesar Rp. 422.190.453,37 atau sebesar 56,64%. sedangkan dari kelompok Jalan, jaringan dan Irigasi naik sebesar Rp. 1.18.722.988,21 atau sebesar 25,21%, terdiri dari Jalan dan Jembatan naik sebesar Rp. 716.631.293,45 atau sebesar 18,42% dari tahun 2022 dan Bangunan air naik sebesar Rp. 473.091.694,76 atau naik sebesar 57,16% dari tahun 2022.

3.6 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	218,198.00	237,250.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	246,700.00	218,000.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8,021,381.00	6,296,803.00
Total	8,486,279.00	6,752,053.00

Penjelasan :

Utang Belanja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.032.683,00 atau sebesar 28,57%, yang terdiri dari Tagihan Telepon naik sebesar Rp. 45.286,00 atau sebesar 13,04% dari tahun 2021; Tagihan Air naik Rp. 109.100,00 atau sebesar 100% dari tahun 2021; dan Tagihan Listrik naik sebesar Rp. 1.879.297,00 atau sebesar 27,75% dari tahun 2021.

3.7 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	15,049,319,947.67	15,049,319,947.67
RK PPKD	11,749,339,514.00	0.00
Surplus/Defisit-LO	(10,233,891,538.83)	0.00
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	17,319,763.00	0.00
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	(579,293,768.63)	0.00
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(16,163,713.97)	
Ekuitas Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka	66,250.00	
Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap	289,696,000.00	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	
Ekuitas Akhir	16,276,392,453.24	15,049,319,947.67

Penjelasan :

Ekuitas selama tahun 2023 mengalami penambahan senilai Rp. atau naik sebesar 8,53% dari tahun 2022. Penambahan tersebut berasal dari Realisasi belanja (RK PPKD) senilai Rp. ,00; Ekuitas Mutasi Aset Tetap senilai Rp. ; dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan senilai Rp. 570.703.178,62. Sedangkan pengurangan Ekuitas berasal dari Surplus/Defisit-LO senilai Rp. 15.821.259.905,65; dan Ekuitas Mutasi Aset Lainnya senilai Rp. 153.537.001,55.

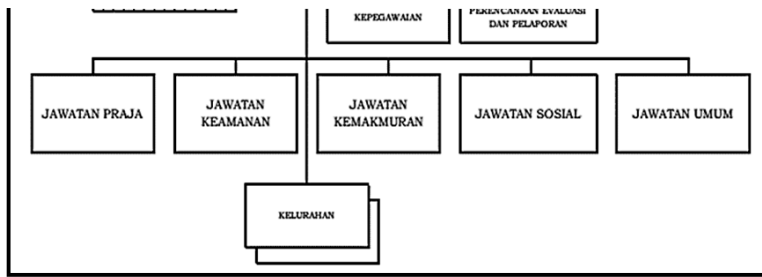
Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 dan perubahan Perwal No 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta yang berkedudukan :

1. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta
2. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Mantri Anom adalah sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta





Susunan Organisasi Kemantren (Perwal Kota Yogyakarta No. 121 tahun 2020)

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemantren menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja.

Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 42.015.000,00 atau 96,17% dari target Rp 42.000.000,00 yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 42.015.000,00 atau 100,04% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 11.791.354.514,00 atau 96,17% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 11.909.750.983,00 atau sebesar 95,96% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 5.868.877.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.464.113.345,00 atau 93,10% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.999.811.415,00 terealisasi sebesar Rp 3.963.019.178,00 atau sebesar 99,08% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 1.499.880.593,00 terealisasi Rp 1.482.618.460,00 atau 98,85% dari anggaran. Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 881.603.531,00 atau 98,84% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah , Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 360.241.100,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 495.962.431,00, Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan Rp. 24.950.000,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 450.000,00, dan Belanja

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 16.318.954.565,57 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.471.035.495,00, Aset Tetap sebesar Rp 14.793.973.295,57 dan Aset Lainnya sebesar Rp 53.945.775,00.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 42.562.112,33,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 16.276.392.453,24.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp 45.010.416,67 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 45.010.416,67.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2023 sebesar Rp 10.278.901.955,50 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp. 10.278.901.955,50 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0,00.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2023 sebesar Rp (10.233.891.538,83)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 16.276.392.453,24 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2023 sebesar (Rp 10.233.891.538,83) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2023.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp 17.319.763,00 ; Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp. (579.293.763,63), Ekuitas Mutasi Aset Lainnya (Rp. 16.163.713,97), Ekuitas Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Rp. 66.250,00, Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap Rp. 289.696.000,00

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 16.276.392.453,24 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

Kepala SKPD

Dra. Antariksa Agus Purnama, M.Si.
NIP . 19690802 198903 1 003